

IMPLEMENTASI E-KATALOG DALAM MENINGKATKAN TRANSPARANSI PENGADAAN BARANG DAN JASA DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI

Vivi Rahmawati¹, Bayu Priambodo²

^{1,2}Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

Email : 22041010128@student.upnjatim.ac.id¹, bayu.p.adneg@upnjatim.ac.id²

ABSTRACT

The purpose of writing this research article is to analyze the implementation of e-catalog in improving the principle of transparency in the procurement of goods and services at the Regional Secretariat of Kediri Regency. E-catalog is an innovative system for the procurement of goods and services carried out electronically, which aims to facilitate access to information related to the implementation of goods and services procurement. In addition, this application has the principles of transparency, efficiency and accountability, which can reduce acts of corruption from the procurement of goods and services carried out by the government. The method used is qualitative with descriptive method. This research involved several informants to obtain related data such as LPSE staff, UKBJ section staff and application users. The results showed that the implementation of e-catalog in the Regional Secretariat of Kediri District has succeeded in increasing transparency related to the reporting of procurement of goods, which can be publicly accessed in the official e-catalog account. Then in the application is open in terms of products, prices and suppliers. However, even though it has applied the principle of transparency, there are still obstacles that the government must overcome in order to maximize the program. The obstacle is the lack of understanding of the procedures and operations of the Procurement Officer (PP) and Commitment Making Officer (PPK). To overcome this obstacle, the researchers recommend training and technical assistance. Thus, it is hoped that the implementation of e-catalog can run well by supporting the transparency of procurement of goods and services within the government.

Keywords: *Implementation, E-Catalog, Transparency, Procurement.*

ABSTRAK

Tujuan penulisan artikel penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi e-katalog dalam meningkatkan prinsip transparansi pada pengadaan barang dan jasa di Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri. E-katalog merupakan sebuah sistem inovasi pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara elektronik yang tujuannya memudahkan akses informasi terkait penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa. Selain itu aplikasi ini memiliki prinsip transparansi, efisiensi dan akuntabilitas yang dapat mengurangi

tindakan korupsi dari penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa dilakukan oleh pemerintah. Metode yang digunakan menggunakan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini melibatkan beberapa informan untuk mendapatkan data terkait seperti staff LPSE, staff bagian UKBJ dan pengguna aplikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengimplementasian e-katalog yang ada di sekretariat daerah kabupaten kediri ini telah berhasil meningkatkan transparansi terkait dengan pelaporan pengadaan barang yang bisa diakses secara umum di akun resmi e-katalog. Kemudian dalam aplikasi tersebut terbuka terkait dengan produk, harga dan penyedia. akan tetapi walaupun sudah menerapkan prinsip transparan masih ada kendala yang harus pemerintah atasi agar memaksimalkan program. Kendala tersebut dari kurangnya pemahaman terkait prosedur dan pengoperasian dari Pejabat Pengadaan (PP) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Untuk mengatasi kendala ini peneliti merekomendasikan adanya pelatihan dan pendampingan teknis. Dengan demikian, harapannya penerapan e-katalog ini dapat berjalan dengan baik dengan mendukung transparansi pengadaan barang dan jasa dilingkungan pemerintah.

Kata Kunci: Implementasi, E-Katalog, Transparansi, Pengadaan Barang dan Jasa.

PENDAHULUAN

Pengadaan barang dan jasa merupakan aspek yang penting dalam pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam mendukung program pembangunan serta mendukung perkembangan perekonomian. Pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 yang merupakan Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang digunakan sebagai landasan hukum dari pengadaan barang dan jasa. Dalam landasan hukum tersebut pengadaan barang dan jasa dapat diartikan sebagai suatu kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh semua instansi pemerintah

di seluruh Indonesia baik dari kementerian, lembaga ataupun perangkat daerah yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan belanja negara (APBN) atau dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari awal pengidentifikasian kebutuhan sampai dengan tahap akhir yaitu serah terima hasil atau produk baik dari barang ataupun jasa.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2014 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 106 tahun 2007 tentang kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pada peraturan tersebut berkaitan dengan Lembaga Pengadaan Barang/jasa

Pemerintah (LKPP) yang merupakan lembaga yang bertanggung jawab dalam mengatur pengadaan barang dan jasa yang ada dilingkungan pemerintahan (Peraturan Presiden, 2014). fungsi dari LKPP ini dibentuk untuk mengarahkan dan mengawasi proses pengadaan barang dan jasa pemerintah agar dalam pelaksanaannya efisien, transparan dan akuntabel (Sadad, 2017). Pengadaan barang terdiri dari benda yang berwujud dan tidak berwujud, bergerak ataupun benda yang tidak bergerak yang dapat dimanfaatkan penggunaannya. misalnya pengadaan alat kantor, konstruksi dan sewa kendaraan. Lalu untuk pengadaan jasa ini meliputi pengadaan jasa konsultasi dan jasa lainnya misalnya pengadaan layanan kebersihan, pengadaan layanan penyedia keamanan dan jasa pemeliharaan.

Pengadaan barang dan jasa di Indonesia pertama kalinya menggunakan metode konvensional. Penerapan metode ini masih tradisional di mana dalam proses pengadaan barang ataupun jasa menggunakan dokumen yang dicetak, adanya pelaksanaan lelang atau sekarang dikenal dengan nama tender yang dilakukan secara tatap muka, dan pengarsipan data yang masih berupa *hard copy* dimana masih menggunakan banyak kertas. penggunaan metode ini kurang efisien dikarenakan memakan waktu yang

lama, pemborosan kertas dan rentan pada praktik kecurangan seperti Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Kemudian seiring dengan perkembangan teknologi khususnya dunia digitalisasi yang cepat dan menyeluruh mempengaruhi semua aspek kehidupan termasuk di lingkungan pemerintahan. Pada penerapan digitalisasi yang dilakukan oleh pemerintah ini pemerintah membuat platform elektronik yang gunanya untuk kebutuhan mempermudah pekerjaan dan pelayanan publik sehingga akan tercipta *good governance*. pengadaan barang dan jasa pemerintah juga menerapkan digitalisasi dalam mempermudah organisasi pemerintah daerah dalam melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan kebutuhannya. (Wolker Sihalo et al., 2024)

Penggunaan digitalisasi pada lingkungan pemerintahan selain dapat mempermudah pekerjaan juga bisa meminimalkan tindakan kecurangan karena dalam penggunaan aplikasi atau *website* terdapat *history* yang *ter-record* oleh sistem serta dalam penggunaan ini mengurangi penggunaan kertas yang berlebihan. Penciptaan pengadaan barang dan jasa secara digitalisasi ini melalui *e-procurement* yang terdiri dari beberapa jenis salah satunya yaitu *menggunakan e-katalog*. Sistem e-katalog ini telah

diterapkan disemua wilayah Indonesia baik pusat dan daerah. Termasuk di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kediri. Penerapan e-katalog ini dilakukan sejak adanya edaran dari peraturan kepala lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa nomor 122 tahun 2022 tentang tata cara penyelenggaraan katalog elektronik (Ariesta, 2021). Dengan adanya peraturan tersebut semua instansi di pemerintahan kabupaten Kediri secara menyeluruh termasuk pada sekretariat daerah menggunakan aplikasi e-katalog ini dalam melakukan pengadaan barang dan jasa. Pada penelitian ini penulis ingin mengetahui terkait dengan pengaruh penerapan pengadaan barang dan jasa secara elektronik menggunakan e-katalog di sekretariat daerah kabupaten Kediri yang dilihat dari salah satu prinsipnya yaitu transparansi.

Langkah pemerintah menggunakan sistem elektronik pada sektor pengadaan barang dan jasa ini dapat mengurangi kasus penyimpangan seperti korupsi di Indonesia sebelum adanya pengadaan barang dan jasa secara elektronik jumlah kasus cukup tinggi. Peraturan lembaga pengadaan barang / jasa pemerintah nomor 2 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan kepala lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah nomor 6 tahun 2016 tentang katalog elektronik dan e-

purchasing. dasar hukum tersebut membahas mengenai penyempurnaan dari sistem pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara digital melalui platform elektronik khususnya pada *e-katalog* (LKPP, 2018).

Katalog elektronik (e-katalog) adalah sistem informasi elektronik yang didalamnya berisikan daftar, merek, jenis, spesifikasi teknis, harga dan jumlah ketersediaan barang/jasa tertentu dari berbagai penyedia yang bisa langsung dibeli oleh instansi pemerintahan. Jadi dalam kutipan Mega Mawarni, (2020) dalam e-katalog ini adalah semacam aplikasi seperti toko elektronik atau *e-commerce* namun lebih di khususkan untuk lingkungan pemerintah. Sehingga masyarakat umum tidak bisa mengakses dengan bebas (Fachruddin et al., 2024). e-katalog ini dibagi menjadi tiga jenis ada e-katalog nasional, e-katalog sektoral dan e-katalog lokal yang bisa digunakan oleh seluruh pemerintah seluruh Indonesia termasuk pemerintahan kabupaten dan kota. Namun dalam pengimplementasian dan efektivitas penggunaan platform ini masih bervariasi di setiap daerah atau di setiap instansi pemerintah. E-katalog ini juga telah di implementasikan di pemerintahan kabupaten Kediri mengutamakan katalog lokal sesuai dengan arahan presiden dan diperkuat dengan

adanya keputusan Kepala LKPP Nomor 122 tahun 2022 terkait dengan penyelenggaraan katalog elektronik. dalam penyelenggaraan e-katalog lokal para pengguna aplikasi yang khususnya Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) di Kabupaten Kediri mereka lebih mengutamakan pelaku usaha lokal yang ada disekitar mereka.

Tujuan dari pengadaan barang dan jasa secara elektronik ini merupakan orientasi dari LKPP dalam memudahkan *stakeholder* untuk menjalankan dan mengakses belanja pemerintah terutama dalam memprioritaskan produk lokal dan UMKM koperasi. Selain dengan orientasi tersebut tujuan lainnya terkait dengan percepatan penyerapan APBN dan APBD. Dengan adanya penerapan e-katalog lokal ini juga membentuk percepatan pembentukan pengelolaan katalog elektronik. etalase dalam e-katalog ini terdiri dari kebutuhan-kebutuhan instansi-instansi terkait seperti *catering*, jasa keamanan, jasa kebersihan, bahan material dan sebagainya terkait dengan jasa dan barang.

Dengan adanya langkah ini pemerintah kabupaten tidak hanya membantu memajukan perekonomian daerah tetapi juga meningkatkan keterlibatan pelaku UMKM lokal pada pengadaan barang dan jasa (Rifqi et al.,

n.d.). selain itu dengan penerapan e-katalog ini membantu pemerintahan kabupaten kediri dalam mempercepat pengadaan barang dan jasa tanpa harus menunggu lama barang ataupun jasa yang mereka beli. Penggunaan ini sangat berbeda dengan penerapan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara konvensional menggunakan metode lelang yang mereka dulu gunakan. Apalagi dalam metode penggunaan lelang ini yang rawan dalam kasus penyimpangan seperti kasus KKN. Dan dalam sistem lelang yang ribet. Pada penggunaan e-katalog ini pengguna lebih praktis dalam melakukan pembelian karena dalam sistem tersedia banyak penyedia barang menawarkan produk mereka.

Penelitian terdahulu tentang implementasi e-katalog ataupun terkait dengan pengadaan barang dan jasa dalam meningkat transparansi pengadaan barang dan jasa yaitu (Sapurtra Rizky, (2024) dalam artikel jurnal menjelaskan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan menggunakan sistem elektronik menggunakan *e-procurement* sudah menerapkan prinsip transparansi yang dapat dilihat dengan adanya pengumuman lelang di *website* Lembaga Pengadaan Barang/ Jasa Secara Elektronik (LPSE). Kemudian (Ramadhani, (2024) dalam artikel jurnalnya juga membahas tentang

pengimplementasian e-katalog dalam pengadaan barang dan jasa di pemerintah Kota Semarang. Pada jurnal ini membahas terkait dengan pengimplementasian e-katalog dalam 7 fenomena termasuk dalam prinsip transparansi. Pada prinsip ini sudah baik dapat dilihat dari kebijakan akses e-katalog yang menyeimbangkan keterbukaan informasi dan keamanan.

Dari hasil penelitian ini tujuannya untuk mengetahui sejauh mana penerapan e-katalog dapat meningkatkan transparansi di Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri dan dengan adanya penelitian dapat memberikan saran atau masukan yang bisa digunakan untuk meningkatkan keterbukaan akses dari informasi terkait penggunaan e-katalog yang ada di lingkungan pemerintahan kabupaten Kediri.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Fokus penelitian ini adalah pengimplementasian e-katalog dalam meningkatkan transparansi di sekretariat daerah kabupaten Kediri. Berdasarkan konsep yang digunakan ini fokus penelitian dapat melihat pengaruh pengimplementasian e-katalog yang diterapkan di lingkungan pemerintahan kabupaten Kediri khususnya di sekretariat daerah kabupaten Kediri dalam meningkatkan transparansi pada pengadaan

barang dan jasa. Sejak pertama kali penggunaan dari edaran peraturan kepala lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa nomor 122 tahun 2022 tentang tata cara penyelenggaraan katalog elektronik. Pada penelitian ini peneliti memilih beberapa orang yang dianggap sebagai informan untuk dapat memberikan informasi terkait data yang lengkap dan fakta yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa melalui penggunaan e-katalog yang dilakukan di sekretariat daerah kabupaten Kediri dengan menggunakan sistem e-katalog.

Teori yang digunakan peneliti menggunakan teori implementasi program dari metode David C. Korten. Menurut David C.Korten Dalam jurnal Abdurrahman, (2022) mengatakan bahwa model implementasi program menurut David C.Korten ini ada tiga elemen yaitu 1) Elemen sasaran. 2) Pelaksana program. 3) Kelompok sasaran. teknik pengumpulan data dalam penelitian ini penulis menggunakan berbagai cara yaitu melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian dalam teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman di mana dalam penelitian ini menggunakan beberapa langkah dalam analisis data seperti pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan teknologi informasi (TI) yang semakin maju menciptakan inovasi-inovasi yang baru dilingkungan pemerintahan khususnya di bagian pengadaan barang dan jasa. Dengan adanya inovasi-inovasi yang terbaru menciptakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Choirunnisa et al., 2023). Peraturan Presiden RI nomor 95 tahun 2018 mengatur dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang melahirkan adanya inovasi dari pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara elektronik (SK Presiden RI, 2018). Salah satu pengadaan pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) ini menggunakan e-purchasing dengan melalui metode ini pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan secara elektronik. Jadi, dalam pengadaan barang dan jasa ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk pemilihan barang dan jasa. Metode tersebut terdapat pada pasal 38 peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintahan. Metode dalam pengadaan barang dan jasa tersebut meliputi; a) e-purchasing, b) pengadaan langsung, c) tender cepat, d) tender. Pada peraturan penggunaan e-purchasing lebih diutamakan dibandingkan

dengan penggunaan metode lainnya.

Menurut kepala bagian pengadaan barang dan jasa kabupaten kediri dikatakan bahwa "*e- Purchasing itu ada dua yaitu e-catalog dan toko daring untuk toko daring itu seperti shopee, go-jek yang umum digunakan oleh semua orang dalam melakukan pembelian baik barang ataupun jasa yang sudah ada diaplikasi yang tersedia. Sedangkan untuk e-katalog itu sebuah inovasi pengadaan barang dan jasa secara elektronik hanya digunakan untuk lingkup pemerintahan*". Tujuan dengan adanya pengimplementasian e-katalog dan toko daring ini agar pengadaan barang dan jasa lebih cepat, mudah, transparan dan langsung tercatat langsung secara elektronik melalui *history* atau aktivitas yang telah dilakukan dalam aplikasi tersebut. penerapan e-katalog ini sudah merata diseluruh Indonesia dengan adanya penerapan inovasi terbaru dari pengadaan barang dan jasa secara elektronik melalui e-katalog ini diharapkan mengurangi kasus KKN lingkungan pemerintah sehingga menciptakan *good governance*.

Berdasarkan dari penelitian ini pengimplementasian e-katalog dalam meningkatkan transparansi pengadaan barang dan jasa ini dilakukan dengan metode David C. Korten. Menurut David C.Korten Dalam jurnal Abdurrahman,

(2022) mengatakan bahwa model implementasi program menurut David C.Korten ini ada tiga elemen yaitu dari program itu sendiri, pelaksana program dan kelompok sasaran (Imelda Christianingrum & Djumiarti, 2019). Dengan hasil wawancara yang telah dilakukan dapat dideskripsikan sebagai berikut:

1. Elemen program pengadaan barang dan jasa secara elektronik menggunakan e-katalog

Pada kesesuaian program dikaitkan dengan hal yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran. Dalam elemen ini merupakan faktor yang paling penting menurut David C.Korten. sasaran program merupakan hal yang penting dalam menyelaraskan antara program dan pemenuhan kebutuhan. Alasan adanya keselarasan ini karena memiliki dampak secara langsung yang bermanfaat dan dapat dirasakan oleh pihak sasaran program (Abdurrahman, (2022). Akan tetapi jika program ini tidak sesuai dengan kebutuhan dari pihak sasaran dari program ini Hasilnya akan tidak sesuai dengan apa yang telah direncanakan sehingga tidak memberi manfaat bagi sasaran program.

Dalam konteks pengimplementasian e-katalog di sekretariat daerah kabupaten Kediri memastikan bahwa pada program e-katalog dapat dirancang dengan memperhatikan kebutuhan dari setiap

instansi atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pelaku usaha lokal adanya keterlibatan aktif dalam kelompok sasaran dalam proses perencanaan dan juga pengimplementasian program sangatlah penting karena dengan adanya partisipasi pemerintah dapat memperoleh masukan terkait dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh kelompok sasaran sehingga program yang diluncurkan dapat bermanfaat bagi kelompok sasaran. Dalam hal ini adanya keselarasan antara program pengadaan barang dan jasa secara elektronik melalui e-katalog dengan kebutuhan kelompok sasaran hal ini mendukung prinsip e-katalog sendiri salah satunya dari prinsip transparansi.

Dengan melibatkan dari berbagai pihak yang berkepentingan setiap keputusan dan juga langkah yang diambil untuk program dapat diawasi dan diverifikasi oleh publik. Pada transparansi ini membantu mencegah dari tindakan penyimpangan dan juga manipulasi data. Dalam keterbukaan informasi sendiri dapat diberikan oleh e katalog untuk memungkinkan semua pihak dapat memantau proses dari pengadaan barang dan jasa cara optimal. Namun apabila pada sistem e-katalog tidak sesuai dengan kebutuhan dari kelompok sasaran maka tidak akan mencapai tujuan dan tidak dapat memberikan manfaat bagi kelompok

sasaran adanya ketidaksesuaian ini mengakibatkan proses pengadaan barang dan jasa tidak efisien, tidak transparan atau bahkan bisa saja terjadi penyimpangan atau tindakan korupsi. Oleh karena itu penting bagi pemerintah untuk terus melakukan evaluasi dan penyesuaian antara program pengadaan barang dan jasa secara elektronik berdasarkan umpan balik dari kelompok sasaran.

Berdasarkan pada hasil dari wawancara dari semua informan dapat disimpulkan bahwa. Pada elemen program pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog yang ada di Kabupaten Kediri sudah diimplementasikan dengan baik. Ini dapat terlihat dari aplikasi e-katalog dalam pengadaan barang jasa melalui elektronik ini memiliki visi dan misi program yang jelas, tujuan dari pembentukan pengadaan barang dan jasa melalui E-katalog ini sudah baik dan bermanfaat untuk meningkatkan transparansi dari pengadaan barang dan jasa. apalagi aplikasi ini menggunakan sistem elektronik ini aktivitas pengguna layanan langsung ter-record. Hal inilah dapat mengurangi penyimpangan dari keadaan barang dan jasa contohnya seperti adanya praktik KKN. Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang terus perkembangan zaman. Padahal aplikasi

edit foto lagu ini pengajuan barang dan jasa secara elektronik dirancang dengan sistem yang canggih dan mudah diakses oleh karena layanan. Maka setiap aktivitas pengguna layanan sistem ini langsung tercatat secara elektronik hal ini menciptakan sejati jenderal yang memudahkan proses pengawasan dan audit data yang lebih baik meminimalkan timbulnya manipulasi data.

Pada elemen ini sangat berkaitan dengan adanya kesesuaian antara program dengan kebutuhan dari kelompok sasaran(Andani & Setyowati, 2019). Pada program pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog ini Sudah baik dikarenakan dalam pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog ini menerapkan prinsip pengadaan yang cepat, mudah, transparan dan tercatat secara elektronik. Menurut kepala bagian pengadaan barang dan jasa Kabupaten Kediri mengatakan bahwa "*katalog ini sudah menjalankan prinsip sesuai dengan peraturan yang ada dalam pasal sudah ada prinsip ini makanya metodenya pun harus mengacu ke sini efisien efektif transparan. Kenapa saya bilang transparan? Katalog itu kan ibarat itu kayak gini. Katalog itu kayak gini masuk ke rumah makan kan pasti disodor di daftar menu, kan ada nasi rawon, nasi soto, dan sebagainya pecel. Nah itu namanya Katalog, jadi kita tinggal, apa itu yang kita*

inginkan? kita belanja apa? kan tinggal nge-click disitu ibaratnya kita pesen, Pak saya mau nasi rawon, dan sebagainya kan tinggal pesen disitu. Sementara harga dan sebagainya itu sudah mengikuti pangsa pasar yang ada, jadi makanya transparan.”.

Seperti yang dijelaskan pada Peraturan Lembaga Pengadaan barang dan jasa pemerintah RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang toko daring dan katalog elektronik dalam pengadaan barang dan jasa (Saputra et al., 2019). Di mana dalam peraturan tersebut menjelaskan tentang tujuan adanya pemanfaatan toko daring dan katalog elektronik dalam pengadaan barang dan jasa agar pengadaan cepat, mudah, transparan dan tercatat secara langsung secara elektronik. dalam sistem e-katalog ini dibagi dengan 3 jenis yaitu sebagai berikut;

- a. Katalog elektronik nasional memiliki jangkauan yang luas yang mana katalog ini menjangkau dari berbagai jenis barang dan jasa yang dibutuhkan oleh seluruh instansi yang ada di Indonesia.
- b. Katalog elektronik sektoral penerapan katalog ini jangkauannya tidak seluas e-katalog nasional. Katalog ini hanya mencakup barang dan jasa yang dibutuhkan dibagian tertentu sesuai dengan tugas

dan fungsi dari kementerian ataupun dari lembaga yang bersangkutan.

- c. Katalog elektronik lokal pengimplementasian katalog ini lebih menjangkau pemerintahan dengan skala lokal atau daerah (provinsi, kabupaten/kota) atau dapat memenuhi kebutuhan dari barang dan jasa dari daerah tersebut.

Adanya Surat Keputusan peraturan kepala lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa nomor 122 tahun 2022 tentang tata cara penyelenggaraan katalog elektronik. menjadi awal dari pengimplementasian pengadaan barang dan jasa secara elektronik di kabupaten kediri dengan menggunakan e-katalog lokal. Program pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog yang ada di Sekretariat Daerah kabupaten Kediri juga berfokus pada transparansi dan keterbukaan sebagai elemen utama referensi ini terkait dengan proses pengadaan yang memungkinkan semua pihak terlibat termasuk masyarakat dapat mengetahui informasi terkait dengan data pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah. Masyarakat dapat mengakses melalui *website* resmi e-katalog pada laman <https://e-katalog.lkpp.go.id/>. Dengan adanya transparansi ini menciptakan lingkungan yang akuntabel yang mana pada setiap transaksi dapat dilacak secara mudah.

Untuk tujuan pengimplementasian dari e-katalog lokal ini peningkatan produk dalam negeri, peningkatan UMKM lokal dan Percepatan Realisasi APBN dan APBD.

Tabel 1.1 Jumlah Penyedia Produk Katalog Lokal di Kabupaten Kediri

Jenis UMKM	jumlah penyedia	Persentase jumlah penyedia
UMKM kecil	192	49.2%
UMKM Mikro	146	37.4%
Non-UMKM	35	8.97%
UMKM Menengah	17	4.36%

Sumber : <https://e-katalog.lkpp.go.id/>

Dengan tabel di atas menunjukkan dengan adanya penerapan e-katalog ini Menciptakan keterbukaan informasi yang memungkinkan semua pihak termasuk masyarakat dapat memantau setiap perkembangan dari proses pengadaan. Kalau lagi dalam katalog ini memberikan sebuah peluang bagi para pelaku usaha lokal atau UMKM untuk turut berpartisipasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah sehingga selain mendukung pembangunan ekonomi daerah juga meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Para pelaku UMKM dapat berpartisipasi dalam pengadaan barang dan jasa di pemerintahan. Program ini memberikan akses yang lebih luas kepada penyedia barang dan jasa untuk berpartisipasi dalam pengadaan di lingkungan. Adanya sistem e-katalog dalam ini prestasi menjadi objek berdasarkan kualitas dan harga yang

ditawarkan bukan berhubungan terkait dengan koneksi antara pengguna dan penyedia.

Dengan semakin banyaknya partisipasi UMKM maka pendapatan dan keberlanjutan usaha lokal dapat meningkat sehingga dapat memperkuat perekonomian daerah. Keterlibatan UMKM dalam proses pengadaan barang dan jasa juga membantu menciptakan persaingan yang sehat dan juga memberikan produk yang bersertifikasi terbaik dalam memenuhi kebutuhan di lingkungan pemerintahan. Selain dalam mendukung pembangunan perekonomian keterlibatan antara UMKM ini juga berdampak pada kesejahteraan masyarakat semakin meningkatnya pendapatan pelaku usaha kemampuan usaha para penyedia akan menambah produksi atau usaha mereka sehingga menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat di lingkungan sekitarnya. Dengan adanya kebijakan dari penggunaan sistem ini memberikan dampak yang sangat positif bagi keberlanjutan pemberdayaan ekonomi lokal serta mendorong prinsip efisiensi pada pengelolaan anggaran daerah.

2. Organisasi pelaksana dari program

Elemen ini menekankan pada kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksanaannya. Dapat diartikan kesesuaian diri kemampuan organisasi

terhadap tugas yang telah dibebankan pada mereka sehingga mereka dapat melaksanakan program yang telah mereka rancang dengan sebaik-baiknya. Sebaliknya jika tidak ada kesesuaian antara organisasi pelaksana dan beban tugas mereka (Jurman K Kundang, 2024). Maka, program tersebut tidak dapat dilakukan secara maksimal dan berakibat tidak tersampaikan manfaat dari program yang telah mereka rencanakan tidak dapat mempengaruhi tujuan dari program yang mereka telah rencanakan.

Pada peraturan lembaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah Republik Indonesia nomor 9 tahun 2021 juga menjelaskan pelaku penyelenggaraan tokoh daring atau e-katalog. Untuk pelaku penyelenggaraan e-katalog yaitu sebagai berikut;

- a. Kepala lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Memiliki tugas untuk bertanggung jawab dalam pengembangan dan pengelolaan kebijakan pengadaan barang dan jasa secara elektronik.
- b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu bertugas dalam menetapkan keputusan pengadaan barang dan jasa.
- c. Pejabat Pengadaan (PP) bertugas dalam mengelola dan mengawasi

semua proses pada pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog hal ini termasuk terkait dengan persiapan, pelaksanaan dan evaluasi

- d. Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) Tugasnya memfasilitasi dan mengelola sistem e-katalog agar memudahkan pada proses pengadaan barang dan jasa
- e. Pedagang Tugasnya menyediakan barang dan layanan jasa yang terdaftar di sistem serta fungsinya berpartisipasi dalam proses pengadaan barang dan jasa melalui sistem tersebut.

Untuk organisasi pelaksana sistem pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Kediri terdiri dari lembaga pengadaan secara elektronik LPSE yang ada dibagian Unit Pengadaan Barang Dan Jasa Di Sekretariat Daerah kabupaten Kediri yang memegang peranan yang sangat penting dalam pengelolaan katalog lokal. Kemudian ada pejabat pengadaan (PP), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan penyedia barang dan jasa untuk memastikan proses pengadaan yang ada pada tingkat lokal dapat berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Didalam instansi pemerintahan mereka memiliki staff Pejabat Pengadaan (PP) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) masing-masing

satu orang.

Pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan di suatu organisasi terdapat keterkaitan peranan antara pengguna, pejabat pembuat komitmen pejabat pengadaan dan penyedia barang dan layanan jasa. Bagi pengguna yang merupakan suatu unit instansi atau individu yang ada dalam instansi yang memiliki kebutuhan terkait dengan barang dan jasa tertentu. Jadi para pengguna ini akan bertanggung jawab dalam mengidentifikasi kebutuhan yang sesuai dengan apa yang mereka butuhkan seperti dari spesifikasi teknis kuantitas dan terkait dengan waktu yang diperlukan. Jadi untuk pengadaan barang dan jasa yang melalui e-katalog pengguna ini akan menyampaikan suatu kebutuhan dari instansi yang melakukan kebutuhan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk diproses lebih lanjut. Dalam peran pengguna ini sangat penting karena mereka pihak yang menggunakan barang dan jasa yang diadakan. Untuk itu pengguna harus memastikan dengan betul terkait kebutuhan mereka secara jelas dan tepat dan sesuai dengan tujuan apa yang mereka capai.

Untuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) merupakan suatu staf yang bertanggung jawab atas pengelolaan keseluruhan terkait dengan proses

pengadaan barang dan jasa yang ada di instansi pemerintahan. Jadi mereka ini tugasnya menyusun rencana pengadaan yang sesuai dengan kebutuhan yang telah diajukan oleh pengguna, menyusun dokumen pengadaan serta mengkoordinasi terkait proses pengadaan dengan Pejabat Pengadaan (PP). Untuk itu PPK sangat bertanggung jawab memastikan pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan prinsip-prinsip dari pengadaan barang dan jasa melalui ikatan termasuk pada prinsip transparansi. Lalu untuk pejabat pengadaan PP merupakan staf yang bertugas dalam melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa yang sesuai dengan arahan dari PPK(Jenderal Perbendaharaan, 2017). Jadi mereka akan bertanggung jawab dalam mengumumkan pengadaan menerima dan juga memproses penawaran dari penyedia. Mereka juga dapat melakukan negosiasi harga jika diperlukan di dalam sistem e-katalog. Tugas PP juga bertanggung jawab dalam penyusunan kontrak pengadaan dan mereka memastikan pengadaan barang dan jasa dapat diterima sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Jadi peranan PP ini sangat penting dalam menjamin transparansi dan akuntabilitas selama proses pengadaan.

Dalam pengadaan barang dan jasa ini staff Pejabat Pengadaan(PP) dan staff

Pejabat Pembuatan Komitmen ini tidak tunjuk langsung oleh instansi terkait namun mereka dipilih melalui hasil seleksi berdasarkan dari kualifikasi yang relevan mereka punya. Pada peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 mengatur tentang pelaku pengadaan barang dan jasa termasuk PP dan PPK(LKPP, 2018). Untuk pemilihan staff PP dan PPK dapat dilakukan sebagai berikut

a. Persyaratan menjadi staff Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

1. Memiliki integritas dan kedisiplinan
2. Dapat mendatangi pakta integritas
3. Memiliki sertifikasi kompetensi keahlian pengadaan barang dan jasa
4. Memiliki minimal sarjana strata satu (S1) atau setara. Apabila dari masih belum terpenuhi maka diganti dengan golongan III/a atau dari golongan tersebut yang setara.
5. Memiliki keahlian manajrial level 3 uang sesuai dengan peraturan undang-undang.

b. Persyaratan menjadi staff Pejabat Pengadaan (PP)

1. Pengelola pengadaan barang dan jasa baik dari aparat sipil

negara (ASN), TNI ataupun lainnya. Yang memiliki sertifikasi kompetensi pejabat pengadaan barang dan jasa.

2. Memiliki integritas dan kedisiplinan
3. Mendatangi pakta integritas

Dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui sistem -katalog yang ada di sekretariat daerah Kabupaten Kediri ini dalam pelaksana pengadaan masih belum terselenggara dengan baik. Walaupun Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pengadaan (PP) Telah memiliki sertifikasi keahlian namun terkadang mereka masih menghadapi kesulitan dalam pengoperasian sistem sehingga dapat mengganggu optimalisasi dari pengadaan barang dan jasa. Kesulitan ini berkaitan dengan kurangnya pemahaman terkait dengan sistem dan prosedur pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog apalagi pada tahun ini mereka menggunakan e-katalog versi 6 yang merupakan pembaruan sistem e-katalog.

3. Sasaran kelompok penerima manfaat

Pada elemen sasaran kelompok penerima manfaat ini menurut David C.Korten. Keberhasilan program sangat bergantung pada penekanan dari kelompok sasaran. Dapat diartikan adanya tuntutan

antara kesesuaian dari program yang dijalankan dengan hasil yang telah ditetapkan oleh organisasi pelaksanaannya. Kesesuaian ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa tujuan dari program dapat tercapai secara efektif sehingga memberikan manfaat secara langsung bagi kelompok sasaran. Dengan itu program tidak hanya dapat berjalan sesuai dari rencana yang telah ditetapkan namun juga dapat relevan dengan kebutuhan kelompok yang menjadi targetnya atau sasarannya. Namun sebaliknya, apabila terjadi ketidaksesuaian antara program yang telah dirancang dengan kebutuhan kelompok sasaran maka berdampak merugikan kedua belah pihak. Pada kelompok sasaran mereka tidak akan merasakan manfaat dari program yang telah dirancang atau ditetapkan dari pelaksana. Kemudian dari pelaksana organisasi mereka akan merasakan kegagalan dalam mencapai tujuan yang mereka harapkan.

Hal inilah yang menyebabkan terjadinya pemborosan dari sumber daya dan hilangnya rasa kepercayaan masyarakat mengenai program yang telah ditetapkan. Pada penerapan e-katalog pihak pelaksana seperti LKPP telah menyesuaikan kebutuhan dari kelompok penerima manfaat dari program pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog ini. Penerima manfaat dari penggunaan e-

katalog ini terdiri dari organisasi pemerintah Daerah (OPD) selaku pengguna, dan pelaku usaha sebagai penyedia. Dengan adanya kesesuaian antara program ini dapat berdampak positif bagi pemerintah. Dalam pelaksanaan pengimplementasian e-katalog di kabupaten Kediri dengan menggunakan katalog lokal bukan hanya mempermudah organisasi perangkat daerah dalam melakukan pengadaan barang dan jasa namun juga dapat memberdayakan para pelaku usaha lokal yang ada disekitar wilayah tersebut. ini dapat mencerminkan keterlibatan antara kelompok sasaran pada proses perencanaan dan pengimplementasian program.

Keterkaitan antara Organisasi Perangkat daerah (OPD) dan UMKM dalam pengimplementasian e-katalog dapat mendukung prinsip transparansi. Karena melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan setiap adanya keputusan dan langka dalam program dapat diawasi oleh publik. Transparansi ini dapat membantu mencegah dari praktik KKN serta manipulasi data. Transparansi ini berkaitan dengan keterbukaan informasi yang diberikan oleh sistem e-katalog yang memungkinkan semua pihak dapat memantau secara langsung proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan. Melalui adanya keterkaitan ini para pelaku

usaha lokal ataupun dari UMKM dapat memberikan masukan untuk membantu pemerintah dalam menyusun kebijakan yang lebih sesuai dengan kondisi nyata yang ada di lapangan. Informasi ini berkaitan dengan produk, harga dan juga penyedia yang ada di sistem katalog yang dapat diakses oleh semua pihak yang terlibat di dalamnya sehingga pada proses pengadaan barang dan jasa dapat menjadi terbuka dan dapat dipantau secara langsung oleh masyarakat luas.

Selain itu adanya keterlibatan antara Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) dan UMKM dapat mendorong partisipasi yang lebih besar dari berbagai pihak dalam proses pengadaan barang dan jasa dalam partisipasi ini dapat memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil pemerintah dalam sistem e-katalog ini didasarkan pada kebutuhan dan harapan dari kelompok sasaran. Dengan adanya prinsip transparansi pemerintah dapat lebih mudah untuk mengidentifikasi dan juga mengatasi potensi dari hambatan yang mungkin terjadi. Setiap adanya transaksi yang dilakukan melalui katalog dapat dilacak dan diaudit dengan mudah karena langsung terekam dalam sistem. Hal inilah yang meminimalkan peluang terjadinya praktik korupsi atau manipulasi data transparansi ini juga dapat membantu dalam meningkatkan akuntabilitas pelaksana

pengadaan. Karena sistem ini memastikan adanya setiap tahapan proses yang dapat dilakukan agar sesuai dengan aturan dan juga prosedur yang berlaku.

Pada hasil wawancara yang telah dilaksanakan dapat disimpulkan dengan adanya sasaran kelompok menerima manfaat ini terhadap implementasi dari program pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog untuk meningkatkan transparansi dari pengadaan barang dan jasa di sekretariat Kabupaten Kediri sudah terimplementasi secara baik dapat dilihat dari keterbukaan informasi. Di mana dalam penggunaan e-katalog ini *website* resmi e-katalog menampilkan data-data digital terkait dengan pengadaan barang dan jasa yang instansi lakukan.

Tabel 1.2 jumlah transaksi e-purchasing menggunakan katalog UMK pada tahun 2022-2024

Jenis penyedia	Jumlah transaksi	Nominal transaksi
Non-UMKM	50	12.840.238.992,00
UMKM Kecil	534	102.069.403.268,00
UMKM Menengah	68	17.129.926.603,00
UMKM Mikro	627	46.461.552.413,50
Total	1.279	178.501.121.276,50

Sumber : <https://e-katalog.lkpp.go.id/>

Data ini menunjukkan adanya sebagian besar dari transaksi pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog yang melibatkan UMKM. Pada data ini mencerminkan adanya komitmen dari pemerintah Kabupaten Kediri dalam mendukung pelaku usaha lokal dan

UMKM melalui sistem pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog. Adanya sistem katalog pemerintah dan pelaku usaha serta masyarakat dapat melihat dan juga mengevaluasi kinerja dari pengadaan barang dan jasa hal inilah yang menciptakan adanya lingkungan yang lebih transparan dan akuntabel yang mana setiap keputusan atau langkah yang diambil dalam proses pengadaan barang dan jasa dapat diawasi secara publik. Dalam sasaran manfaat ini juga dapat kita lihat dari Efisiensi dalam proses pengadaan barang dan jasa. Melalui sistem e-katalog memungkinkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam melakukan sebuah pembelian barang dan jasa lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan metode konvensional. Dapat kita lihat dari perbandingan

Tabel 1.1 perbandingan Pengadaan barang dan jasa konvensional dengan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik

Aspek	Pengadaan barang dan jasa secara elektronik	Pengadaan konvensional
Waktu dan dana	Harga setiap produk dapat dibikin secara langsung oleh siapapun tanpa login	Harga dan spesifikasi hanya diketahui oleh pelaku usaha dan supplier
Transparansi harga	Lebih efisien, transaksi lebih paperless, hemat waktu, cukup melalui website	Harus datang langsung ke toko, membutuhkan waktu kerja yang lama, dan dokumen pengadaan cukup banyak
Tertib administrasi	Setiap paket pembelian tercatat oleh sistem dengan historical yang lengkap	Tidak dicatatkan, lebih susah ketika ada pemeriksaan
Dukungan program pemerintah	Mendukung peningkatan produk dalam negeri, meningkatkan taraf hidup masyarakat, pemerataan ekonomi UMKM	Kurang variasi pelaku usaha, biasanya hanya memilih langganan yang sudah dikenal

Sumber: hasil wawancara staff UKPBJ

Dari data diatas dengan penggunaan e-katalog Memungkinkan para organisasi perangkat daerah atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD)melakukan pembelian dengan cara yang lebih efisien, menghemat waktu dan juga mengurangi penggunaan kertas (*paperless*). Hal ini sangat berbeda dengan metode konvensional yang masih memerlukan kunjungan langsung yang ada ke toko, faktor kerja yang lebih lama dan bisa berbulan-bulan dan banyaknya dokumen pengadaan yang harus diurus. transparansi dari harga setiap produk dapat diakses oleh siapapun tanpa perlu *login* berbeda dengan pengadaan secara konvensional dalam pengadaan tersebut harga dan spesifikasi hanya diketahui oleh pelaku dan satuan kerja. Secara keseluruhan penggunaan aplikasi e-katalog ini Sangat bermanfaat berkaitan dengan prinsip efisiensi transparansi dan dukungan dari para pelaku usaha lokal dibandingkan dengan metode konvensional.

KESIMPULAN

E-katalog merupakan salah satu sistem pengadaan barang dan jasa elektronik yang memudahkan pengguna melakukan pengadaan barang dan jasa secara mudah, transparan dan akuntabel melalui platform yang sudah tersedia. penerapan e-katalog ini sudah menyuluh di wilayah Indonesia. Namun pada tingkat

efektivitasnya ada perbedaan di setiap wilayah. Kabupaten Kediri juga menerapkan sistem e-katalog ini sejak adanya edaran peraturan kepala lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa nomor 122 tahun 2022 tentang tata cara penyelenggaraan katalog elektronik. Untuk pengimplementasian dari program ini sudah sangat baik. Jika dianalisis menggunakan 3 elemen indikator implementasi menurut teori dari David C.Korten yaitu dari elemen program. Pada elemen ini kesesuaian antara program dan sasaran pelaksanaannya sudah sesuai. Dapat dilihat dari pengimplementasian program ini tujuannya untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, akuntabel dan *history* kegiatan dapat terekam secara langsung pada sistem.

Untuk sasaran penerima manfaat sudah sesuai antara sasaran kelompok penerima manfaat yang mana keterkaitan antara tujuan program dengan penerima manfaat seperti pengguna, penyedia dan pelaksana yang dapat menerima manfaat dari program ini. Namun pada elemen pelaksana program belum berjalan secara baik. Adapun hambatan utama yang menyebabkan belum maksimalnya elemen ini yaitu dari kompetensi Pejabat Pengadaan (PP) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang masih belum memahami dari prosedur teknis

pelaksanaan e-katalog. Sehingga adanya keterbatasan ini dapat berdampak pada kurang optimalnya proses pengadaan barang jasa secara elektronik. Langkah yang bisa dilakukan oleh pemerintah yaitu;

1. Pelatihan intensif dan pengembangan kompetensi. menyelenggarakan program pelatihan intensif yang berfokus pada prosedur teknis pada pelaksanaan katalog. Tujuan dari pelatihan ini untuk meningkatkan kemampuan mereka agar lebih baik. Latihan ini mencakup dari penggunaan platform katalog, pemahaman teks dan teknik-teknik pengadaan barang dan jasa secara modern dengan adanya pelatihan yang intensif diharapkan pejabat pengadaan Pejabat Pengadaan (PP) dan pejabat pembuat komitmen (PPK) dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam mengoperasikan sistem e-katalog.
2. Pendampingan teknis. Pemerintah menyediakan pendampingan teknis yang dilakukan oleh ahli ataupun mentor yang memiliki pengalaman dalam pengadaan elektronik pada bimbingan ini tujuannya agar Pejabat Pengadaan (PP) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat lebih mudah memahami dan mengatasi hambatan teknis yang mereka hadapi selama

proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik melalui katalog ini.

3. Evaluasi secara berkala. Adanya evaluasi yang berkala terhadap kinerja Pejabat Pengadaan (PP) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sangat penting untuk mengetahui sejauh mana mereka dapat memahami dan menerapkan prosedur dari penggunaannya katalog. Dengan adanya evaluasi ini pemerintah dapat memperbaiki dan juga meningkatkan kualitas dari pelaksana program.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. (2022). IMPLEMENTASI PROGRAM KOTAKU (KOTA TANPA KUMUH) DALAM MENGATASI PERMUKIMAN KUMUH DI KELURAHAN BELIMBING RAYAKECAMATAN MURUNG PUDAK KABUPATEN TABALONG. *Http://Jurnal.Stiatabalong.Ac.Id/Ind ex.Php/JAPB, Vol.5*, 1–14.
- Andani, A. T. V., & Setyowati, E. (2019). Implementasi Program Pelayanan One Day Service dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Badan Pertanahan Nasional Kota. In *dan Fadillah Amin/ JIAP* (Vol. 5, Issue 3).
- Ariesta, D. (2021). Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa Melalui E-Catalogue di Kecamatan Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta. *Ascarya: Journal of Islamic Science, Culture, and Social Studies*, 1(2), 156–172. <https://doi.org/10.53754/iscs.v1i2.26>
- Choirunnisa, L., Hajar, T., Oktaviana, C., Ridlo, A. A., Rohmah, E. I., Sunan, U., & Surabaya, A. (2023). Sosio Yustisia : Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial PERAN SISTEM PEMERINTAH BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) DALAM MENINGKATKAN AKSESIBILITAS PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA. *Mei*, 3(1).
- Fachruddin, I., Fanani, I., & Kunci, K. (2024). IMPLEMENTASI PENGADAAN BARANG DAN JASA MELALUI SISTEM KATALOG ELEKTRONIK (E-PURCHASING) DI KABUPATEN KEDIRI. In *Jurnal Interaksi* (Vol. 01, Issue 02).
- Imelda Christianingrum, S., & Djumiarti Jurusan Administrasi Publik, T. (2019). *IMPLEMENTASI PROGRAM KOTA TANPA KUMUH DI KECAMATAN SEMARANG TIMUR*. <http://fisip.undip.ac.id>
- Jenderal Perbendaharaan, D. (2017). *Panduan Teknis Pejabat Pembuat Komitmen*.

- www.djpbk.kemenkeu.go.id
- Jurman K Kundang. (2024). *PENGEMBANGAN PERANGKAT MODUL-12*. LKPP. (2018). *Peraturan LKPP Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa*.
- Mega Mawarni, G. G. & S. D. M. (2020). PENERAPAN PRINSIP PENGADAAN BARANG DAN JASA MELALUI APLIKASI E-PURCHASING DAN E-KATALOG. *Wacana Publik*, 14, 1–12.
- Peraturan Presiden. (2014). *Peraturan Presiden RI Nomor 157 Tahun 2014 Tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan*.
- Ramadhani, D. (2024). *IMPLEMENTASI E-KATALOG DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA DI PEMERINTAH KOTA SEMARANG*. www.fisip.undip.ac.id
- Rifqi, M., Zami, Z., & Utami, D. A. (2024). *ANALISIS PENERAPAN E-CATALOGUE DI PEMERINTAHAN KABUPATEN GRESIK ANALYSIS OF E-CATALOGUE IMPLEMENTATION IN GRESIK DISTRICT GOVERNMENT*. 3(4), 2024–2314.
- Sadad, A. (2017). EFEKTIVITAS PENGADAAN BARANG DAN JASA SECARA ELEKTRONIK (E-PROCUREMENT) PADA LPSE KOTA PEKANBARU. In *Jom FISIP* (Vol. 4, Issue 2).
- Sapurtra Rizky, A. (2024). Analisis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Elektronik Pada Pemerintahan Kabupaten Banyumas. *SEIKO : Journal of Management & Business*, 7(1), 1346–1353.
- Saputra, H. S., Sistem, J., Fakultas, I., & Komputer, I. (2019). *PERANCANGAN E-KATALOG BERBASIS WEBSITE SEBAGAI MEDIA INFORMASI KOLEKSI PADA MUSEUM LAMPUNG SKRIPSI Disusun Oleh*.
- SK LKPP RI. (2018). *Peraturan Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Katalog Elektronik dan E-Purchasing*.
- SK Presiden RI. (2018). *PERATURAN PREIDEN RI NOMOR 95 TAHUN 2018 TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK*.
- Wolker Sihaloho, S., Ariza, D., & Munandar, A. (2024). *EFEKTIFITAS*

*E-KATALOG PADA KEGIATAN
PENGADAAN BARANG DAN JASA
(PBJ) DALAM UPAYA
PEMERINTAH MENCEGAH
FRAUD (Vol. 7, Issue 1).*